

Indonesia

Subsidi batu bara G20



Indonesia memberikan **dukungan yang signifikan** terhadap produksi dan konsumsi PLTU batu bara

Batu bara dan perekonomian Indonesia

US\$11.947



PDB per kapita, PPP
(rata-rata 2016–2017)

2.626



Impor 2016
(setara kiloton minyak)

208.160



Ekspor 2016
(setara kiloton minyak)

54%



Persentase dalam bauran daya
(oleh pembangkitan)

Temuan kunci

- Indonesia memberikan lebih dari Rp9,7 triliun (US\$0,7 juta) dukungan fiskal per tahun bagi produksi PLTU batu bara (rata-rata 2016–2017).
- Sejak Maret 2018 hingga saat ini, pemerintah Indonesia mengatur harga maksimum batu bara yang dijual kepada pembangkit listrik dan mewajibkan produsen batu bara mengalokasikan 20–25% produksinya untuk kebutuhan domestik. Kebijakan ini berperan sebagai subsidi bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN), dalam bentuk pengendalian harga pasar.
- Terdapat peningkatan subsidi listrik di tahun 2019 guna mengompensasi kenaikan harga bahan bakar yang digunakan pembangkit listrik. Karena 60% pembangkit listrik PLN berbahan bakar batu bara, hal ini dapat dikategorikan sebagai subsidi penggunaan batu bara.
- Hasil penilaian sejawat negara-negara G20 mengenai subsidi bahan bakar fosil untuk Indonesia baru-baru ini menunjukkan kemajuan dalam reformasi subsidi BBM dan penetapan harga listrik untuk periode 2014–2017, namun perlu digarisbawahi adanya temuan bahwa hasil self-review Indonesia tidak mencatat beberapa kebijakan seperti kewajiban DMO dan subsidi untuk industri batu bara (IISD, 2018; OECD, 2018).

Pentingnya bahan bakar fosil dan komitmen penghapusan subsidi bertahap

- 87% listrik di Indonesia berasal dari bahan bakar fosil (IEA, 2019), dan pemerintah masih memberikan dukungan terhadap produksi dan konsumsi bahan bakar fosil serta listrik bertenaga bahan bakar fosil.
- Sebagai anggota G20, Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus secara bertahap subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien dalam jangka menengah, sebagaimana yang telah disepakati pada tahun 2009 (G20, 2009). Sebagai salah satu negara penanda tangan *Convention of Biological Diversity* (Aichi Target 3), Indonesia juga berkomitmen menghapus secara bertahap subsidi yang berbahaya bagi lingkungan, termasuk di dalamnya adalah subsidi bagi bahan bakar fosil pada tahun 2020 (UN, 1992).

Dukungan pemerintah terhadap produksi batu bara

- Perusahaan tambang milik negara PT Bukit Asam menyediakan investasi modal sebesar Rp1,9 triliun (US\$147 juta per tahun (rata-rata 2016–2017)).
- Pemerintah juga menyediakan dukungan fiskal sebesar Rp96,3 miliar (US\$6,7 juta) per tahun untuk riset, pengembangan, teknologi, dan pelatihan dalam eksplorasi, pertambangan, dan pemrosesan batu bara (rata-rata 2016–2017).

Dukungan pemerintah terhadap produksi listrik berbahan bakar batu bara

- Pemerintah terus mendorong pengembangan PLTU batu bara menggunakan Teknologi Batu Bara Bersih untuk memenuhi kebutuhan listrik (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2018).
- Pada tahun 2015, pemerintah meluncurkan program kelistrikan 35000 Megawatt (MW) untuk mempercepat pembangkitan listrik, di mana 57% listrik yang dihasilkan diperkirakan berasal dari batu bara (PLN, 2019). Saat awal program ini diluncurkan, direncanakan adanya penambahan 22 GW PLTU di Pulau Jawa,- yang belakangan direvisi menjadi 13 GW karena kelebihan persediaan (Agustinus, 2017). Program ini menerima Rp350 triliun (US\$26 miliar) dari anggaran pemerintah dan juga investor swasta (Sianipar, 2018). Karena PLN tidak diizinkan untuk menaikkan tarif listrik hingga 2019, sumber bahan bakar yang termurah pun diprioritaskan, yang juga menjelaskan mengapa batu bara merupakan bahan bakar utama dari 60% pembangkit PLN.
- Pada 2018, pemerintah Indonesia menetapkan harga maksimum batu bara untuk keperluan pembangkit listrik adalah sebesar US\$70 per ton – dengan kewajiban DMO sebesar 20–25%. Kebijakan ini dapat dilihat sebagai subsidi bagi PLN dalam bentuk pengendalian harga pasar (Asmarini dan Jensen, 2018). Pada tahun 2018 sekitar 114 juta ton batu bara dikonsumsi oleh pasar domestik di bawah kebijakan ini, yang menghasilkan total penghematan bagi PLN sebesar Rp20 triliun (US\$1,4 miliar) (Meilanova, 2018).

Dukungan pemerintah Indonesia terhadap konsumsi dan produksi batu bara dan listrik berbahan bakar batu bara Rp miliar, rata-rata tahunan 2016–2017

Instrumen	Produksi batu bara ⁱ	Listrik berbahan bakar batu bara	Konsumsi batu bara ⁱⁱ	Dukungan transisi ⁱⁱⁱ
Dukungan fiskal (transfer anggaran dan pembebasan pajak)	96.300	9.702.341	30.952.906	tidak ada yang teridentifikasi
Keuangan publik	tidak ada yang teridentifikasi	3.815.499	tidak ada yang teridentifikasi	tidak ada yang teridentifikasi
Domestik	–	3.815.499	–	–
Internasional	–	tidak ada yang teridentifikasi	–	–
Investasi badan usaha milik negara	1,959,125	tidak ada yang teridentifikasi	tidak ada yang teridentifikasi	tidak ada yang teridentifikasi

Catatan: untuk rincian dan sumber lebih lanjut lihat lembar data Indonesia yang tersedia di odi.org/g20-coal-subsidies/indonesia.

ⁱ Kategori ini termasuk dukungan bagi eksplorasi, penambangan, pemrosesan, dan pengangkutan batu bara.

ⁱⁱ Kategori ini mencakup dukungan terhadap konsumsi listrik berbahan bakar batu bara, dan batu bara selain untuk penggunaan dalam pembangkitan listrik berbahan bakar batu bara (atau untuk kogenerasi listrik dan panas).

ⁱⁱⁱ Kategori ini mencakup dukungan untuk menutup lokasi tambang, dan bagi pekerja serta masyarakat dalam transisinya meninggalkan batu bara dan listrik berbahan bakar batu bara.

Dukungan pemerintah terhadap konsumsi batu bara dan listrik berbahan bakar batu bara

- Riset kami mengidentifikasi dukungan fiskal sebesar Rp30,9 triliun (US\$2,3 miliar) per tahun untuk konsumsi listrik berbahan bakar batu bara (rata-rata 2016–2017).
- Menurut estimasi terakhir, subsidi untuk konsumsi listrik pada 2019 meningkat dari total tahunan sebelumnya sebesar Rp47,7 triliun (US\$3,4 miliar) menjadi Rp57 triliun (US\$4 miliar) (Asmara, 2018). Alasannya adalah sebagai kompensasi bagi produsen listrik atas kenaikan harga bahan bakar pembangkit listrik khususnya batu bara. Subsidi ini bertujuan menyediakan listrik lebih murah bagi rumah tangga berpendapatan rendah walaupun dalam penerapannya masih belum konsisten.

Dukungan pemerintah terhadap transisi untuk meninggalkan batu bara dan listrik berbahan bakar batu bara

- Indonesia memiliki salah satu tingkat intensitas emisi tertinggi di sektor listrik (755 gCO₂/kWh) di antara negara anggota G20 (Climate Transparency Initiative, 2018). Tidak ada rencana yang teridentifikasi untuk bertransisi meninggalkan batu bara.
- Batu bara tetap menjadi sumber bahan bakar pembangkit listrik paling penting di Indonesia dan dinilai sebagai kontributor pertumbuhan ekonomi.

Referensi

- Agustinus, M. (2017) 'Tender Pembangkit Listrik 9.000 MW di Jawa Diundur'. Detik Finance, 10 April (finance.detik.com/energi/d-3470212/tender-pembangkit-listrik-9000-mw-di-jawa-diundur)
- Asmara, C. G. (2018) 'Subsidi Listrik 2019 Naik Jadi Rp 57 T, Ini Alasannya'. CNBC Indonesia, 18 September (www.cnbcindonesia.com/news/20180919141612-4-33836/subsidi-listrik-2019-naik-jadi-rp-57-t-ini-alasannya)
- Asmarini, W. and Jensen, F. (2018) 'Indonesia caps domestic coal price for power stations, could hit miners'. Reuters, 9 March (www.reuters.com/article/us-indonesia-coal/indonesia-caps-domestic-coal-price-for-power-stations-could-hit-miners-idUSKCN1GL0F7)
- Climate Transparency Initiative (2018) *Brown to green: the G20 transition to a low-carbon economy 2018*. Berlin: Climate Transparency Initiative (www.climate-transparency.org/wp-content/uploads/2019/01/2018-BROWN-TO-GREEN-REPORT-FINAL.pdf)
- G20 (2019) Pernyataan Pemimpin G20: Pittsburgh Summit. Pittsburgh: G20 (www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0925.html)
- IEA – International Energy Agency (2019) 'Statistics: electricity generation by fuel' (electronic dataset, International Energy Agency) (www.iea.org/statistics/)
- IISD – International Institute for Sustainable Development (2018) *Missing the 23 per cent target: roadblocks to the development of renewable energy in Indonesia*. Winnipeg: International Institute for Sustainable Development (www.iisd.org/sites/default/files/publications/roadblocks-indonesia-renewable-energy.pdf)
- Meilanova, D.R. (2018) 'Rencana Penghapusan DMO Batu Bara Dinilai Bakal Beban PLN, Ekonomi & Bisnis'. Bisnis.com, 30 July (ekonomi.bisnis.com/read/20180730/44/822025/rencana-penghapusan-dmo-batu-bara-dinilai-bakal-bebani-pln)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2018) 'Mendorong Pemanfaatan EBT Sekaligus Menjaga Energi Trilemma'. Rilis berita, 2 November (www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/mendorong-pemanfaatan-ebt-sekaligus-menjaga-energi-trilemma)

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development (2018) *Indonesia's effort to phase out and rationalise its fossil-fuel subsidies: a report on the G20 peer-review of inefficient fossil-fuel subsidies that encourage wasteful consumption in Indonesia*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (www.oecd.org/site/tadffss/publication/G20%20peer%20review%20Indonesia_Final-v2.pdf)

PLN – Perusahaan Listrik Negara (2019) *Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) 2010–2019*. Jakarta: PT PLN (Persero)

Sianipar, T. (2018) 'Pemerintah didesak batalkan pembangunan PLTU batu bara di Jawa'. BBC Indonesia, 19 Januari (www.bbc.com/indonesia/media-42745431)

PBB – Perserikatan Bangsa-Bangsa (1992) Konvensi Keanekaragaman Hayati. 1760 UNTS 20619, berlaku 29 Desember 1993 (www.cbd.int/convention/text/default.shtml)



Studi negara ini adalah salah satu dalam rangkaian yang terdiri 18 bagian. Temuan negara tersebut dibandingkan dalam laporan ringkasan, yang dapat Anda temukan di odi.org/g20-coal-subsidies dengan referensi lengkap, pengakuan, dan informasi lebih lanjut mengenai metodologi dan sumber data.

Informasi yang tidak direferensikan dalam rangkuman ini berasal dari analisis yang dilakukan untuk laporan ini, tersedia di lembar data Indonesia di odi.org/g20-coal-subsidies/indonesia

Karya ini dilisensikan berdasarkan CC BY-NC 4.0